

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1.Kajian Teori

2.1.1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merujuk pada proses aktualisasi keputusan-keputusan kebijakan ke dalam bentuk tindakan yang berdampak nyata di masyarakat. Dalam pandangan (Van Meter & Van Horn, 1975), implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang diarahkan untuk mencapai sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan tertentu.

Sementara itu, Grindle (1980) menjelaskan bahwa implementasi tidak hanya terbatas pada proses teknis administratif, melainkan mencakup pelaksanaan dari keputusan politik yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun keputusan eksekutif. Dengan demikian, implementasi kebijakan melibatkan sejumlah aktor, sumber daya, dan pengaruh dari berbagai konteks lingkungan sosial dan politik yang menyertainya (Sabatier & Mazmanian, 1979). Secara garis besar, implementasi kebijakan publik bukanlah sekadar menjalankan peraturan yang telah ditetapkan, melainkan mencakup upaya strategis dalam mewujudkan tujuan kebijakan dengan memperhatikan keterlibatan berbagai pihak serta kondisi yang ada di lapangan.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap krusial dalam proses kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan nyata yang berdampak langsung pada masyarakat (Sabatier & Mazmanian, 1979). Tanpa implementasi yang baik, kebijakan yang telah dirancang dengan matang pun tidak akan memberikan hasil yang optimal. Menurut Van Meter & Van Horn (1975), implementasi dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan untuk mencapai sasaran kebijakan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam keputusan politik. Proses ini tidak hanya bersifat mekanis atau administratif, tetapi juga mencakup proses adaptasi, komunikasi, koordinasi, dan interpretasi atas kebijakan di lapangan. Hal senada juga dikemukakan oleh Grindle (1980), yang menyatakan bahwa implementasi mencakup pelaksanaan keputusan yang bersifat politis, baik berupa undang-undang, peraturan, maupun instruksi dari eksekutif. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan jembatan yang menghubungkan antara perumusan kebijakan dan dampaknya di masyarakat Van Meter & Van Horn (1975).

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh banyak faktor internal dan eksternal yang dapat memperkuat maupun melemahkan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Van Meter dan Van Horn mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang menekankan adanya enam indikator penting yang saling terkait dan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan Van Meter & Van Horn (1975). Pertama, standar dan tujuan kebijakan, yaitu seberapa jelas dan realistis sasaran kebijakan yang hendak dicapai. Semakin spesifik dan terukur tujuan kebijakan, maka semakin

mudah bagi pelaksana untuk menerapkannya secara efektif. Kedua, sumber daya yang mencakup tenaga kerja, anggaran, informasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Sumber daya yang tidak mencukupi dapat menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan, walaupun kebijakannya telah dirancang dengan baik.

Ketiga, karakteristik organisasi pelaksana, seperti struktur organisasi, kapasitas kelembagaan, serta kompetensi dan budaya kerja pelaksana. Organisasi yang memiliki struktur fleksibel dan sumber daya manusia yang profesional cenderung lebih adaptif dalam mengimplementasikan kebijakan (Maria Da Silva et al., 2020). Keempat, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaannya. Koordinasi dan komunikasi yang intensif antar lembaga, baik vertikal maupun horizontal, menjadi penting untuk menyamakan persepsi dan meminimalkan konflik kepentingan. Kelima, disposisi atau sikap pelaksana, yaitu sejauh mana pelaksana memahami dan mendukung kebijakan tersebut. Sikap pelaksana yang positif, termasuk komitmen dan motivasi tinggi, akan memberikan pengaruh besar terhadap kualitas implementasi. Terakhir, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang dapat memperkuat atau menghambat jalannya kebijakan. Perubahan dinamika eksternal seperti krisis ekonomi, resistensi sosial, atau tekanan politik dapat memengaruhi arah dan proses pelaksanaan kebijakan.

Lebih lanjut, keberhasilan implementasi kebijakan publik juga dipengaruhi oleh berbagai aspek lain seperti efektivitas sistem monitoring dan evaluasi, keterlibatan masyarakat, serta adanya komitmen politik dari para pengambil kebijakan. Proses monitoring dan evaluasi sangat diperlukan untuk menilai kinerja implementasi secara berkala serta memberikan umpan balik bagi perbaikan.

Keterlibatan masyarakat, terutama sebagai penerima manfaat atau pelaku pendukung, juga menjadi kunci penting agar kebijakan berjalan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Selain itu, dukungan dari aktor politik dan birokrasi menjadi faktor penentu dalam mendorong keberlanjutan implementasi.

Dalam konteks penelitian mengenai implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 oleh PT BatamOn Global Group di Kota Batam, model implementasi Van Meter dan Van Horn menjadi kerangka analisis yang sangat relevan. Peraturan ini mengatur kebijakan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Penggunaan model ini akan membantu mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan oleh pihak swasta seperti PT BatamOn Global Group, baik dari segi pemahaman terhadap tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya internal, pola koordinasi dengan pemerintah, hingga hambatan eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, model Van Meter dan Van Horn tidak hanya memberikan panduan konseptual, tetapi juga menjadi alat analisis praktis untuk menilai efektivitas strategi implementasi kebijakan publik di tingkat lokal.

Salah satu pendekatan teoritis yang cukup berpengaruh dalam memahami proses implementasi kebijakan publik adalah model yang dikembangkan oleh Van Meter & Van Horn (1975). Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai indikator yang saling berkaitan. Menurut mereka, keberhasilan suatu kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, melainkan juga oleh sejauh mana

kebijakan tersebut dapat diterjemahkan ke dalam praktik nyata di lapangan melalui kerja sama yang efektif antara para pelaksana, sumber daya yang memadai, serta kondisi lingkungan yang mendukung. Mereka mengusulkan enam indikator kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik organisasi pelaksana, (4) komunikasi antarlembaga pelaksana, (5) disposisi atau sikap para pelaksana, dan (6) kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Indikator pertama adalah standar dan tujuan kebijakan, yang merujuk pada seberapa jelas dan terukur arah yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut. Apabila tujuan kebijakan dirumuskan secara ambigu atau tidak realistis, maka para pelaksana akan mengalami kesulitan dalam menafsirkan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan (Fischer, 2019; Mutiarin et al., 2018). Oleh karena itu, perumusan tujuan kebijakan harus spesifik, operasional, dan dapat diukur agar dapat diterjemahkan dengan baik dalam implementasi. Indikator kedua adalah sumber daya, yang mencakup segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, seperti anggaran, tenaga kerja, fasilitas, informasi, dan waktu. Bahkan kebijakan yang paling baik sekalipun tidak akan dapat diimplementasikan dengan efektif tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai. Keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan utama dalam proses implementasi, terutama jika pelaksana tidak dibekali dengan kemampuan teknis atau dukungan finansial yang cukup.

Selanjutnya, karakteristik organisasi pelaksana juga memegang peranan penting. Struktur organisasi, pola kepemimpinan, sistem koordinasi internal, serta

kapasitas manajerial sangat menentukan bagaimana suatu kebijakan dijalankan di tingkat pelaksana. Organisasi yang memiliki struktur birokrasi yang terlalu kaku atau hirarki yang rumit dapat memperlambat proses implementasi. Sebaliknya, organisasi yang fleksibel dan adaptif akan lebih mudah menyesuaikan kebijakan dengan kondisi aktual di lapangan. Selain itu, komunikasi antar organisasi dan pelaksana kebijakan juga merupakan faktor penting (Dunn, 2017; Dye, 1992). Proses komunikasi yang baik akan memastikan bahwa pesan, instruksi, dan tujuan kebijakan tersampaikan secara utuh dan konsisten dari perumus kebijakan kepada pelaksana di lapangan. Kegagalan dalam komunikasi dapat menimbulkan perbedaan persepsi atau kesalahan dalam pelaksanaan, yang berujung pada ketidakefektifan kebijakan.

Indikator kelima adalah disposisi atau sikap pelaksana, yang mengacu pada tingkat pemahaman, komitmen, dan kesediaan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan tersebut. Jika para pelaksana memahami dan mendukung isi kebijakan, mereka akan cenderung melaksanakannya dengan sungguh-sungguh (Crozier, 2007; Dye, 1992). Namun, jika terdapat resistensi atau sikap apatis dari pelaksana, maka pelaksanaan kebijakan akan terhambat, meskipun perencanaan dan sumber daya telah tersedia dengan baik. Terakhir, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga sangat berpengaruh terhadap implementasi. Lingkungan yang stabil dan mendukung akan mempermudah pelaksanaan kebijakan, sedangkan kondisi sosial-politik yang bergejolak atau resistensi dari masyarakat dapat menjadi kendala serius yang menghambat tercapainya tujuan kebijakan.

Model Van Meter & Van Horn (1975) menjadi salah satu kerangka analisis yang komprehensif dalam mengevaluasi proses implementasi kebijakan publik karena mempertimbangkan berbagai aspek yang bersifat teknis maupun non-teknis. Dalam konteks penelitian ini, yang mengkaji strategi implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 oleh PT BatamOn Global Group di Kota Batam, model ini sangat relevan digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan di sektor swasta. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana perusahaan memahami dan menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan pemerintah, bagaimana koordinasi dilakukan antara perusahaan dan instansi pemerintah, serta tantangan eksternal seperti respon masyarakat atau kondisi lingkungan yang memengaruhi proses implementasi. Dengan menggunakan model ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai praktik implementasi kebijakan serta rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh aktor pelaksana.

2.1.2. Teori Strategi Organisasi

Teori Manajemen Strategis menurut Fred R. David (2011) merupakan suatu pendekatan terpadu yang digunakan oleh organisasi untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan strategis guna mencapai tujuan jangka panjang. Manajemen strategis tidak hanya berfokus pada penyusunan rencana, tetapi juga pada proses dinamis yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal organisasi serta respon terhadap perubahan lingkungan. Proses manajemen strategis menurut David mencakup tiga tahapan utama, yaitu: perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi (Good et al., 2023).

Tahap perumusan strategi melibatkan kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, serta menilai kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Langkah ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menetapkan tujuan jangka panjang dan memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut (Saputra et al., 2019). Strategi yang dirumuskan harus relevan dengan konteks organisasi dan mempertimbangkan faktor eksternal seperti persaingan, regulasi pemerintah, serta kondisi pasar.

Tahap kedua adalah implementasi strategi, yang mencakup penerjemahan strategi ke dalam tindakan konkret seperti penyusunan kebijakan, alokasi sumber daya, pengorganisasian kegiatan, serta pengarahan dan motivasi sumber daya Manusia (Langfield-Smith, 1997). Dalam tahap ini, keterlibatan manajer dan seluruh unit dalam organisasi sangat penting agar strategi dapat dijalankan secara efektif. Implementasi strategi juga memerlukan struktur organisasi yang mendukung, budaya kerja yang adaptif, dan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi.

Tahap terakhir adalah evaluasi strategi, yang bertujuan untuk mengukur kinerja dan efektivitas dari strategi yang telah diimplementasikan (Langfield-Smith, 1997; Mintzberg, 1989). Evaluasi dilakukan dengan cara memantau hasil, mengevaluasi pencapaian tujuan, dan mengambil tindakan korektif jika terdapat penyimpangan. Proses evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa strategi tetap relevan dengan perubahan lingkungan dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Ketiga tahapan ini bersifat siklikal dan berkesinambungan, sehingga strategi

organisasi dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan dinamika internal maupun eksternal.

Analisis SWOT merupakan salah satu alat strategis yang digunakan untuk memahami posisi organisasi dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. SWOT adalah singkatan dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Model ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis, karena memberikan pandangan menyeluruh mengenai kondisi internal dan eksternal organisasi. Dalam konteks manajemen strategis, analisis SWOT sering digunakan pada tahap awal perumusan strategi untuk menentukan langkah strategis yang paling tepat (Heshmati et al., 2022).

Elemen pertama dalam SWOT adalah Strengths, yang merujuk pada keunggulan internal organisasi yang memberikan nilai tambah atau keunggulan kompetitif. Contohnya bisa berupa keahlian sumber daya manusia, teknologi yang dimiliki, reputasi perusahaan, atau sumber daya finansial yang kuat. Sementara itu, Weaknesses mengacu pada keterbatasan atau kekurangan internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, seperti kurangnya inovasi, sistem manajemen yang lemah, atau keterbatasan sumber daya.

Dari sisi eksternal, Opportunities adalah faktor-faktor positif yang berasal dari luar organisasi dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja. Peluang dapat berupa perubahan regulasi yang mendukung, kemajuan teknologi, pertumbuhan pasar, atau tren sosial yang mendukung produk atau layanan organisasi. Sebaliknya, Threats adalah tantangan atau hambatan eksternal yang

dapat mengganggu atau mengancam keberhasilan organisasi. Ancaman dapat datang dari persaingan yang semakin ketat, perubahan kebijakan pemerintah, krisis ekonomi, atau bencana alam.

Analisis SWOT memberikan kerangka kerja untuk mengembangkan strategi yang memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal, sekaligus meminimalkan kelemahan dan menghadapi ancaman yang ada (Sobhani et al., 2023; Zhao et al., 2023). Oleh karena itu, penerapan SWOT sangat membantu organisasi dalam menyusun strategi yang realistis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dalam konteks implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 oleh PT Batam Global Group di Kota Batam, analisis SWOT dapat digunakan untuk menilai kesiapan dan kapasitas strategis perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperkuat atau diantisipasi dalam pelaksanaannya.

2.1.3. Teori Kolaborasi Pemerintah dan Swasta (Public-Private Partnership/PPP)

Public-Private Partnership (PPP) atau Kemitraan Pemerintah dan Swasta merupakan sebuah pendekatan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, di mana sektor pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta untuk membiayai, membangun, dan mengelola infrastruktur maupun layanan publik. PPP berangkat dari teori kolaborasi yang menekankan pentingnya sinergi antar aktor, khususnya antara sektor publik dan sektor privat, dalam menangani masalah-masalah

kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh satu sektor saja (Y. Wang et al., 2021; Yong & Ling, 2000).

Secara teoritis, konsep PPP mengacu pada New Public Management (NPM) yang mempromosikan efisiensi sektor publik melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta, termasuk kompetisi, hasil berbasis kinerja, dan manajemen berbasis kontrak. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, sementara pihak swasta berperan sebagai pelaksana dan penyedia sumber daya. Kolaborasi ini bukan hanya tentang pembagian tanggung jawab, tetapi juga mencerminkan pembagian risiko, modal, serta manfaat antara kedua belah pihak (Yescombe, 2007).

Menurut Hodge dan Greve (2007), PPP tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Model ini dipandang sebagai solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran negara dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, terutama dalam konteks negara berkembang. Lebih jauh lagi, PPP dianggap mampu mempercepat realisasi proyek strategis nasional melalui dukungan keahlian teknis, efisiensi operasional, dan investasi dari pihak swasta.

Dalam praktiknya, PPP mencakup beberapa bentuk kerja sama, antara lain: *Build-Operate-Transfer* (BOT), *Build-Own-Operate* (BOO), *Design-Build-Finance-Operate* (DBFO), hingga leasing atau outsourcing sebagian fungsi layanan publik. Bentuk kerja sama ini dipilih berdasarkan kompleksitas proyek, jangka waktu pelaksanaan, dan tingkat risiko yang siap ditanggung oleh masing-masing

pihak. PPP tidak hanya berlaku dalam pembangunan fisik seperti jalan tol, pelabuhan, atau rumah sakit, tetapi juga dalam sektor pengelolaan lingkungan, energi terbarukan, dan pengembangan kawasan wisata.

Dalam konteks kebijakan nasional seperti implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, PPP menjadi salah satu pendekatan strategis yang penting. Pemerintah membutuhkan kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah melalui teknologi, pendanaan, dan inovasi manajemen. PT BatamOn Global Group, misalnya, dapat menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah laut di wilayah Batam, di mana kemitraan ini harus dilandasi oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan sektor swasta.

Dalam literature lainnya, Bovaird (2004) menekankan bahwa keberhasilan PPP bergantung pada faktor-faktor seperti kejelasan tujuan bersama, keterbukaan komunikasi, saling percaya, kepemimpinan yang efektif, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial-politik. Oleh karena itu, dalam merancang kemitraan publik-swasta, penting untuk mempertimbangkan aspek legal, institusional, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang memungkinkan akuntabilitas kedua belah pihak tetap terjaga sepanjang proses implementasi. Dengan demikian, teori dan praktik PPP memberikan landasan penting dalam memahami bagaimana aktor publik dan swasta dapat bersinergi dalam menjawab tantangan pembangunan, khususnya dalam bidang pengelolaan lingkungan, pengembangan kawasan, serta penyediaan layanan publik yang berkelanjutan.

2.1.4. Teori Good Governance

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep yang muncul sebagai respons terhadap berbagai kelemahan birokrasi pemerintahan konvensional, seperti inefisiensi, sentralisasi kekuasaan, rendahnya akuntabilitas, dan minimnya partisipasi publik. Secara umum, *Good Governance* dapat diartikan sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dan pengelolaan sumber daya publik yang transparan, akuntabel, partisipatif, responsif, efektif, dan berorientasi pada hukum (*rule of law*). Konsep ini sangat penting dalam konteks reformasi administrasi publik dan peningkatan kualitas layanan publik.

Menurut UNDP (1997), terdapat delapan prinsip utama dalam praktik *Good Governance*, yaitu: partisipasi, penegakan hukum (*rule of law*), transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan dan inklusivitas, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif warga negara, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi pilar utama dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan integritas lembaga-lembaga publik.

Dalam konteks kerja sama pemerintah dan swasta, penerapan prinsip *Good Governance* menjadi sangat krusial. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk menjalankan tugas secara efisien, tetapi juga harus menciptakan mekanisme kolaboratif yang menjamin keterlibatan pemangku kepentingan, kejelasan pembagian peran, dan sistem pertanggungjawaban yang transparan. Keberhasilan

program seperti *Public-Private Partnership* (PPP) sangat dipengaruhi oleh sejauh mana prinsip tata kelola yang baik diterapkan oleh kedua belah pihak.

Selain itu, *Good Governance* juga mendorong praktik pemerintahan yang berbasis kinerja dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pemerintah yang menerapkan tata kelola yang baik tidak hanya sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator pembangunan dan inovator dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam hal ini, pendekatan kolaboratif menjadi penting untuk mendorong kemitraan strategis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Dalam studi kebijakan lingkungan, *Good Governance* juga menjadi kerangka normatif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengendalian dampak lingkungan. Hal ini relevan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang membutuhkan keterlibatan banyak aktor serta mekanisme koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah, lembaga publik dan swasta, serta komunitas lokal. Tanpa tata kelola yang baik, implementasi kebijakan tersebut berisiko tidak efektif atau tidak berkelanjutan.

Beberapa literatur seperti Grindle (2007) menekankan bahwa penerapan *Good Governance* harus kontekstual, realistis, dan disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan yang ada. Sementara itu, Fukuyama (2013) menekankan bahwa tata kelola yang baik bukan hanya soal prosedur demokratis, tetapi juga kemampuan negara dalam menyusun kebijakan yang berkualitas dan menegakkannya secara konsisten.

Dengan demikian, teori *Good Governance* menyediakan kerangka teoritis yang esensial dalam menganalisis efektivitas implementasi kebijakan publik, termasuk kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta, agar dapat terlaksana secara efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks lokal, seperti di Kota Batam, diyakini mampu meningkatkan tingkat kepercayaan publik, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. 2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Frey, K., Gutberlet, J., & Besen, G. R. (2024) Scopus	Solid Waste Policies And Climate Change – The Cases Of Federal Brazil And Canadafederal Canada	Kualitatif Komparatif	- Terdapat tantangan yang signifikan dalam koordinasi kebijakan di sistem pemerintahan federal baik di Brasil maupun Kanada, terutama dalam integrasi kebijakan pengelolaan sampah dan iklim.

				- Pengalaman kedua negara menunjukkan adanya perbedaan dalam kerangka kelembagaan dan alat kebijakan yang digunakan, yang memengaruhi tingkat integrasi antara kebijakan iklim dan kebijakan pengelolaan sampah. - Prinsip inklusi sosial mendapat perhatian yang berbeda dalam kebijakan masing-masing negara, dengan penekanan yang bervariasi tergantung pada konteks sosial-politik dan kapasitas kelembagaan.
--	--	--	--	---

				- Potensi pembelajaran timbal balik (mutual learning) antara Brasil dan Kanada disorot sebagai peluang untuk memperbaiki respons demokrasi federal dalam menghadapi tantangan kompleks yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pengelolaan sampah.
2	Permana et al., (2023)	Strategi Penerapan Csr Di Quest Hotel San Denpasar Dalam Mendukung Program Pemerintah Kota Denpasar Masa Covid	Deskriptif Kualitatif	- Dalam menghadapi masa pandemi COVID-19, Quest Hotel San Denpasar dapat menerapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan program Corporate Social Responsibility (CSR).

				- Strategi pertama yaitu strategi SO (Strength–Opportunity), dengan melibatkan masyarakat Desa Padang Sambian Kelod secara langsung dalam pelaksanaan program CSR sebagai upaya memperkuat kemitraan dan memaksimalkan peluang pemberdayaan sosial. Selanjutnya, strategi ST (Strength–Threat) dapat diterapkan dengan cara memetakan kelurahan atau banjar yang belum pernah menerima program CSR dari pihak hotel, sehingga potensi kesenjangan sosial dapat diminimalkan.
--	--	--	--	---

				- Sementara itu, strategi WO (Weakness–Opportunity) diwujudkan melalui pertemuan informal yang dilakukan secara berkala antara pihak hotel, kepala desa, dan masyarakat guna membahas serta mengevaluasi efektivitas program CSR, sehingga dapat komunikasi dan keterlibatan publik. - Terakhir, strategi WT (Weakness–Threat) dilaksanakan dengan mendorong desa untuk secara aktif mengusulkan program CSR setiap tahunnya kepada perusahaan, sebagai antisipatif dalam
--	--	--	--	---

				menjaga kesinambungan program di tengah tantangan yang ada.
3	Hidayat (2024)	Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan dan Strategi Pemasaran Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.	Kualitatif	- CSR tidak hanya untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga sebagai strategi pemasaran yang meningkatkan profit dan citra perusahaan.
4	Tjoanto, A. K., & Tambunan, M. R. (2022)	Tantangan dan strategi dalam proses implementasi	Kualitatif	- Tantangan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan strategi implementasi kebijakan secara bertahap dan

		kebijakan pajak karbon		pembangunan koalisi yang mendukung kebijakan tersebut, pengelolaan pendapatan secara tepat, dan yang paling penting menjadikan kebijakan pajak karbon sebagai bagian dari bauran kebijakan agar dapat mengatasi permasalahan iklim dengan cepat dan mencapai dekarbonisasi jangka Panjang.
5	Ramadhanitya, S., & Ali, H. (2025)	Pengaruh Analisis Lingkungan Formulasi, Implementasi dan Strategi terhadap Keunggulan Bersaing.	Kualitatif	- Strategi adalah suatu perencanaan yang mengandung prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan tertentu. Prinsip-prinsip strategi mencakup beberapa elemen penting. Pertama dan

				yang paling utama, strategi harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur agar dapat memberikan arah yang tepat dalam pelaksanaannya. - Strategi diwujudkan melalui pelaksanaan program, penyusunan prosedur, dan pengalokasian anggaran oleh pihak manajemen. Proses ini juga dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari pengembangan strategi ke dalam tindakan konkret. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan kemampuan berpikir logis dan intuitif, dorongan
--	--	--	--	--

				motivasi yang kuat, serta keterampilan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Karena implementasi strategi identik dengan perubahan, maka proses ini sering kali menghadapi berbagai variabel yang tidak terduga dan berpotensi menjadi hambatan.
6	Rulandari, N., Natision, A., Esien, E. B., & Kesmawan, A. P. (2022).	The Policy Implementation Of Social Ministry's Cash Assistance Program During The Covid-19 Pandemic In Jakarta	Kualitatif	- Untuk mencapai tujuan dari kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST), diperlukan strategi kebijakan yang tepat dan sesuai. Salah satu strategi yang diterapkan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah dengan menyalurkan seluruh

				bantuan dalam bentuk uang tunai, bukan lagi dalam bentuk barang kebutuhan pokok yang rentan terhadap praktik penyalahgunaan atau korupsi.
7	Hill, M., & Hupe, P. (2021).	Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance	Kualitatif	- Penelusuran terhadap kajian ini memberikan gambaran reflektif mengenai perkembangan studi implementasi kebijakan secara global. Buku ini menawarkan pendekatan baru terhadap proses kebijakan dengan menekankan peran penting para pelaksana kebijakan dalam membentuk, menyesuaikan, dan mengarahkan kebijakan

				saat mereka menjalankan tugasnya. - Keberhasilan dalam mencapai tujuan kebijakan dapat menjadi faktor penentu kemenangan politik, sementara kebijakan yang dianggap gagal sering kali mencerminkan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem politik secara keseluruhan.
--	--	--	--	---

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam sektor lingkungan dan pengelolaan sampah, sangat dipengaruhi oleh strategi, koordinasi, dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Penelitian Frey, Gutberlet, dan Besen (2024) menyoroti tantangan koordinasi dalam sistem pemerintahan federal Brasil dan Kanada dalam mengintegrasikan kebijakan pengelolaan sampah dan perubahan iklim. Hal ini menunjukkan bahwa strategi

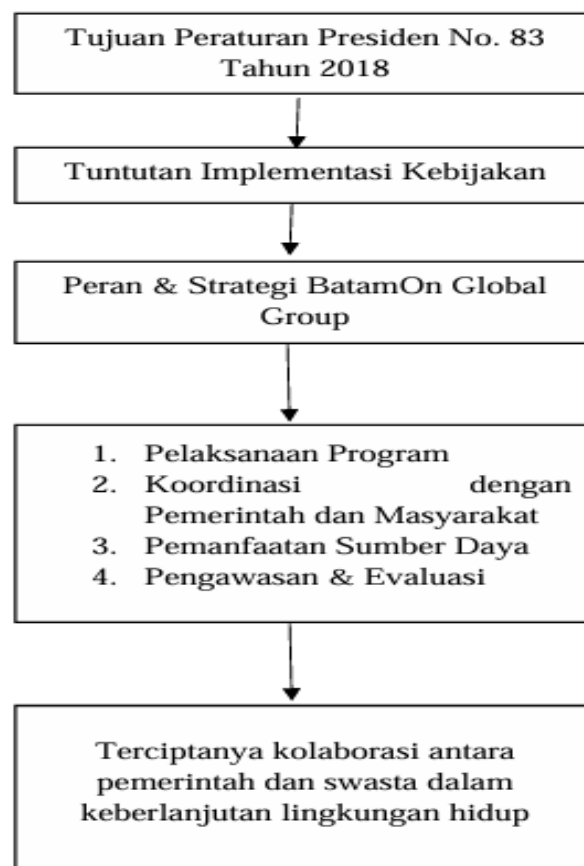
implementasi kebijakan di sektor lingkungan membutuhkan sinergi antarinstansi dan konsistensi kelembagaan, yang juga menjadi tantangan potensial dalam penerapan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 di tingkat lokal oleh sektor swasta.

Permana et al., (2023) mengembangkan strategi implementasi program CSR di masa pandemi dengan pendekatan SWOT, seperti pelibatan masyarakat, pemetaan wilayah sasaran, evaluasi partisipatif, dan usulan program tahunan dari aparat desa. Pendekatan ini relevan untuk diterapkan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018, yang menuntut kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis tanggung jawab bersama. Senada dengan itu, Hidayat (2024) menyampaikan bahwa CSR bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga strategi bisnis yang dapat membangun citra perusahaan sejalan dengan prinsip tanggung jawab perusahaan dalam Perpres tersebut.

Selanjutnya, studi Tjoanto dan Tambunan (2022) mengemukakan bahwa strategi implementasi kebijakan lingkungan seperti pajak karbon membutuhkan tahapan yang sistematis, dukungan koalisi, dan integrasi dalam bauran kebijakan nasional. Ini menunjukkan pentingnya dukungan lintas aktor dan perencanaan jangka panjang yang juga relevan dalam konteks pelibatan dunia usaha dalam kebijakan pengelolaan sampah. Di sisi lain, Ramadhanitya dan Ali (2025) menekankan bahwa strategi implementasi harus memiliki arah yang jelas, terukur, dan dijalankan melalui prosedur manajerial yang adaptif, mengingat banyaknya variabel yang bisa menjadi hambatan dalam proses perubahan kebijakan.

Dalam konteks implementasi Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018, prinsip transparansi dan efektivitas juga menjadi kunci keberhasilan dalam pelibatan perusahaan untuk mengurangi timbulan sampah melalui pendekatan berbasis tanggung jawab produsen. Terakhir (Hill & Hupe, 2021) menggaris bawahi peran pelaksana kebijakan dalam menentukan arah dan dampak kebijakan, yang berarti PT BatamOn Global Group sebagai aktor implementasi memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa kebijakan nasional dapat berjalan secara efektif di tingkat lokal, sesuai dengan konteks dan tantangan di Kota Batam.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Adaptasi dari (Hill & Hupe, 2021)

Implementasi kebijakan publik merupakan proses penting dalam memastikan bahwa tujuan dari sebuah kebijakan dapat tercapai secara efektif di lapangan. Menurut teori implementasi kebijakan (Hill & Hupe, 2021), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh aktor pelaksana, konteks institusional, strategi, serta daya dukung sumber daya. Dalam konteks ini, strategi implementasi mencakup perencanaan program, alokasi anggaran, pelibatan stakeholder, komunikasi, serta pengawasan. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut mendorong keterlibatan sektor swasta sebagai bagian dari pendekatan multi-aktor. PT BatamOn Global Group sebagai pelaksana kebijakan berperan strategis dalam menjalankan amanat tersebut, khususnya dalam konteks Kota Batam yang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah laut dan darat. Lebih lanjut, penelitian ini mengintegrasikan beberapa konsep dasar sebagai fondasi berpikir, yaitu:

Tabel 2. 2. Konsep Utama Penelitian

Konsep	Penjelasan Singkat
Implementasi Kebijakan	Proses penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan operasional di tingkat organisasi atau lapangan (Grindle, 1980; Hill & Hupe, 2021).
Strategi Implementasi	Rangkaian rencana terstruktur yang mencakup program, prosedur, anggaran, komunikasi, dan koordinasi untuk mencapai tujuan kebijakan (Ramadhanitya & Ali).
Keterlibatan Sektor Swasta	Peran dunia usaha sebagai aktor non-pemerintah dalam membantu pemerintah mencapai tujuan kebijakan lingkungan melalui CSR dan kolaborasi kelembagaan.

Arah penelitian ini ialah mengkaji bagaimana strategi yang digunakan oleh PT Batamon Global Group dalam mengimplementasikan Perpres No. 83 Tahun 2018, dengan menilai sejauh mana strategi tersebut sesuai dengan prinsip implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Batam.